

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TANAH YANG MERUGIKAN PEMBELI (Studi Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tjk)

Oleh:

LORENZA SINDHI OCTAVIANA

Penipuan dalam jual beli tanah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah yang merugikan pembeli di wilayah Bandar Lampung. Dengan meningkatnya kasus penipuan yang melibatkan transaksi tanah, penting untuk memahami bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses tersebut.

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, termasuk hakim, jaksa, anggota kepolisian, Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah menggunakan teori kebijakan hukum pidana yang terdiri dari 3 (tiga) tahap. Pertama tahap formulasi yaitu regulasi mengenai tindak pidana penipuan jual beli tanah dapat di kaitan dengan Pasal 378 KUHP. Sedangkan pada tahap aplikasi aparat penegak hukum menerapkan dakwaaan berbentuk alternatif kesatu yakni pada pasal 378 KUHP. Pada tahap eksekusi berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tjk

Lorenza Sindhi Octaviana

menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Faktor- faktor yang menghambat tindak pidana penipuan jual beli tanah, yaitu faktor masyarakat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara melaporkan tindakan penipuan dan proses hukum yang ada. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum sangat penting untuk memberdayakan masyarakat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan terhadap penipuan.

Saran dari penulis hendaknya para instansi terkait untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik dan memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait tindak pidana penipuan jual beli tanah agar masyarakat memiliki kesadaran hukum. serta masyarakat yang sudah menjadi korban tindak pidana jual beli tanah hendaknya segera melapor untuk membantu proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penipuan, Tanah

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST FRAUDULENT LAND SALE AND PURCHASE THAT HARMS THE BUYER (Study of Decision Number 171/Pid.B/2023/PN Tjk)

By:
Lorenza Sindhi Octaviana

Fraud in the sale and purchase of land is one form of criminal offense that often occurs and has a significant negative impact on consumers. This study aims to explore law enforcement against criminal acts of land sale and purchase fraud that harm consumers in the Bandar Lampung area. With the increase in fraud cases involving land transactions, it is important to understand how law enforcement can be carried out effectively and what factors become obstacles in the process.

The research method used in this study is normative legal research complemented by an empirical approach. Data was collected through in-depth interviews with various resource persons, including judges, prosecutors, members of the police, employees of the National Land Agency (BPN), as well as academics who have expertise in the field of law. In addition, this research also used a literature study to gather information from various relevant legal sources, including laws and regulations governing the crime of fraud.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that law enforcement against criminal acts of land sale and purchase fraud uses the theory of criminal law policy which consists of 3 (three) stages. First, the formulation stage, namely the regulation of the crime of fraud in buying and selling land can be linked to Article 378 of the Criminal Code. While at the stage of application stage, law enforcement officers apply the first alternative form of charges, namely Article 378 of the Criminal Code. At the execution stage based on Decision Number 171/Pid.B/2023/PN Tjk, the defendant was sentenced to 2 (two) years imprisonment. Factors that hinder the criminal act of land sale and purchase fraud, namely the community factor, the lack of public understanding of how to report

Lorenza Sindhi Octaviana

fraud and the existing legal process. Therefore, increasing education and socialization about the law is very important to empower the community, as well as strengthen prevention efforts against fraud.

The author's suggestion is that related agencies should work together to coordinate well and provide socialization or counseling related to criminal acts of land fraud so that the community has legal awareness. And people who have become victims of criminal acts of land fraud should immediately report to help the law enforcement process.

Keywords: Law Enforcement, Fraud, Land